

EVALUASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DESA SRIBHAWONO

(SKRIPSI)

Oleh

**Bregito Firgiawan
NPM 2016021002**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DESA SRIBHAWONO

Oleh

BREGITO FIRGIAWAN

Menurut SK Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020 Desa Sribhawono merupakan salah satu desa yang menjadi *pilot project* dari program *smart village*. Namun berdasarkan pra-riset, terdapat beberapa masalah yaitu; pelayanan yang masih manual terhadap masyarakat, *website* desa yang tidak bisa diakses, dan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program *smart village*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah evaluasi formatif menurut Dale dalam Sulastri, dkk. (2017) dengan cakupan *relevance* (kesesuaian pelaksanaan program dengan visi misi program), *effectiveness* (manfaat program), *impact* (dampak atau perubahan setelah adanya program), dan *sustainability* (keberlanjutan).

Hasil penelitian evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono menunjukkan bahwa; Pertama, pelaksanaan program telah memenuhi cakupan *relevance* jika hanya dilihat dari aspek ketersediaan namun dalam pelaksanaan masih ditemukan catatan karena adanya layanan perpustakaan yang sudah tidak aktif. Kedua, pelaksanaan program telah memenuhi dua aspek manfaat yaitu *smart government* dan *smart economy*, namun untuk *smart people* masih ditemukan catatan bahwa terdapat masyarakat yang tidak memahami adanya program. Ketiga, adanya program telah memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, namun terdapat dampak negatif yang muncul karena adanya oknum yang menyalahgunakan layanan internet gratis. Ke-empat, pelaksanaan program telah memenuhi cakupan *sustainability* karena adanya operator yang kompeten serta keterlibatannya dalam Forum Komunikasi Digitalisasi Desa (FKDD).

Kata kunci: Evaluasi, Program *Smart Village*, Pelaksanaan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE SMART VILLAGE PROGRAM OF SRIBHAWONO VILLAGE

By

BREGITO FIRGIAWAN

According to Governor's Decree Number G/228/II.02/HK/2020, Sribhawono Village is a pilot project for the smart village program. However, based on pre-research, there are several problems, services are still manual, the village website was error and there are still people who aren't aware the existence of smart village program. This research aims to know how the smart village program is evaluated in Sribhawono Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The theory used is formative evaluation according to Dale in Sulastri, et al. (2017) with coverage of relevance (suitability of program implementation with the program's vision and mission), effectiveness (program benefits), impact (change after the program), and sustainability. The results this research are; First, the implementation of the program has met the aspect of availability, but during the implementation, notes were still found because library services were no longer active. Second, the implementation of the program has fulfilled two aspects of benefits, smart government and smart economy, but for smart people, there are still notes that there are people who do not understand the existence of the program. Third, the existence of the program has had a positive impact both directly and indirectly on society, but there are negative impacts that arise due to individuals who abuse free internet services. Fourth, program implementation has met the scope of sustainability due to the presence of competent operators and their involvement in the Village Digitalization Communication Forum (FKDD).

Keywords: Evaluation, The Smart Village Program, Implementation.

EVALUASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DESA SRIBHAWONO

Oleh

Bregito Firgiawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM *SMART VILLAGE*
DESA SRIBHAWONO**

Nama Mahasiswa : **Bregito Firgiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021002**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Two handwritten signatures in black ink are present. The top signature is above a dotted line, and the bottom signature is below another dotted line.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Bregito Firgiawan

NPM. 2016021002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bregito Firgiawan lahir di Desa Ujung Batu, Kabupaten Jepara pada tanggal 26 Maret 2002 yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara putra dari Bapak Mulyono dan Ibu Siswanti.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Al-Islam pada tahun 2007-2008, kemudian dilanjutkan di SDN 3 Sribhawono pada tahun 2008-2014, setelah lulus SD, Penulis masuk di SMPN 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2017-2020. Kemudian pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lolos seleksi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama masa perkuliahan Penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Penulis bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Sepak Bola pada tahun 2020, dalam mengikuti kegiatan tersebut Penulis merasa bangga dan bahagia karena memiliki wadah untuk menyalurkan bakat yang dimiliki Penulis. Pada tahun 2023 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kejadian, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Penulis ikut serta dalam Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Best Things Never Come Easy”

(Luka Modric)

“Enjoy the process to get the success”

(Bregito Firgiawan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW
Semoga karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya Tulis ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

Mulyono dan Siswanti

Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, dan segala pengorbanan yang telah menghantarkan anaknya menuju gerbang keberhasilan.

Terima kasih untuk keluarga besar "**Jurusan Ilmu Pemerintahan**" dan Almamater tercinta "**Universitas Lampung**"

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “**Evaluasi Program Smart Village Desa Sribhawono**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Program Smart Village Desa Sribhawono**” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penulisan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini melibatkan kontribusi dari berbagai pihak. Melalui sanwacana ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku Dosen Pembahas. Terima kasih Bapak yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih ibu atas ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan.
7. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Mulyono dan Ibu Siswanti, terima kasih Bapak dan Ibu telah atas segala do'a, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Kepada Kakak Penulis, Mas Radhika Anggieyana dan Mbak Desti Triyani terima kasih sudah memberikan segala nasihat kepada Penulis, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah.
9. Kepada Afifah Mutiara Ratri, terima kasih sudah menemani, dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah mengorbankan segala waktu dan tenaga kepada Penulis sebagai tempat untuk berkeluh kesah, mencurahkan isi hati, diskusi, dan menjadi pendamping yang baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta kesuksesan.
10. Kepada Informan Penelitian, Bapak I Wayan Gunawan, Bapak Yohannes Sulistiyono, Bapak Buich Wisnu Prabowo, Bapak Anvel, dan Masyarakat Desa Sribhawono.
11. Kepada Bapak Mizwar, Bapak Yadi, Bapak Toni, Ibu Esti, Ibu Sri, Ibu Mira, dan Ibu Parti serta seluruh pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung, terima kasih atas waktu, tempat, dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, merupakan pengalaman yang membanggakan pernah terlibat dalam acara GTTGN XXIV Provinsi Lampung.

12. Kepada Sahabat Penulis, Ferdi Galang Bonanza, Bagus Dwi Risadi, Surya Kusuma Putra, Erik Ever Ellohim, Andre Irawan, Galih Indrawan, Galih Kurnia Putra, dan kawan-kawan satu tongkrongan. Terima kasih telah mewarnai hidup Penulis, semoga sukses.
13. Kepada Sahabat Penulis “The Javanance”, Muhammad Arya Maulana, Efrildo Zalerico Farkaroni, Diska Amanda Hamidi, Zacky Mauladin Aryadzikara, terima kasih telah menjadi tempat berbagi dan berdiskusi di masa perkuliahan penulis, semoga sukses.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, Rapli Santosa, Ferdian Gautama, Krisna Bayu, Desi Maharani, Ribka Dewi, Ramadhan, Justi, Jihan, Omar, Gariz, dan seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.
15. Kepada teman-teman “KKN Desa Kejadian”, Findo, Tiya, Liesky, Puan, Wina, dan Fityah, terima kasih atas pengalaman KKN yang telah dilewati bersama.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Penulis,

Bregito Firgiawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Evaluasi	12
2.1.1 Pengertian dan Model Evaluasi.....	12
2.1.2 Evaluasi Formatif.....	14
2.1.3 Metode Evaluasi Kebijakan Publik.....	20
2.2 Desa dan Pemerintahan Desa	22
2.2.1 Desa.....	22
2.2.2 Pemerintah Desa	23
2.3 Teknologi Informasi	30
2.3.1 Pengertian Teknologi Informasi.....	30
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi.....	31
2.3.3 Komponen Teknologi Informasi.....	32
2.3.4 Kelebihan Penerapan Teknologi Informasi.....	33

2.4	Konsep Smart Village	34
2.4.1	Pengertian Smart Village	34
2.4.2	Landasan Program <i>Smart Village</i>	35
2.4.3	Sasaran Program Smart Village	36
2.4.4	Strategi Pelaksanaan <i>Smart Village</i>	37
2.4.5	Prinsip Smart Village	38
2.5	Kerangka Pikir.....	40
III. METODE PENELITIAN		43
3.1	Tipe Penelitian.....	43
3.2	Lokasi Penelitian	44
3.3	Sumber Data.....	44
3.4	Fokus Penelitian	45
3.5	Informan Penelitian	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Pengolahan Data	56
3.8	Teknik Analisis Data	57
3.9	Teknik Validasi Data.....	59
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1	Gambaran Umum	61
4.1.1	Profil Desa Sribhawono	61
4.1.2	Sejarah Singkat Desa Sribhawono	62
4.1.3	Logo Pemerintah Desa Sribhawono.....	63
4.1.4	Visi Desa Sribawono.....	63
4.1.5	Misi Desa Sribawono	63
4.1.6	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sribawono	64
4.1.7	Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	64
4.1.8	Dasar Hukum Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung.....	65
4.1.9	Logo Program <i>Smart Village</i>	66
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	67
4.2.1	Relevance	70
4.2.2	Effectiveness	81

4.2.3	Impact	92
4.2.4	Sustainability	98
V. SIMPULAN DAN SARAN		104
5.1	Simpulan.....	104
5.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN.....		110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kondisi <i>Smart Village</i> di Provinsi Lampung	6
2. Data Informan Penelitian	45
3. Data Hasil Evaluasi Program <i>smart village</i> Desa Sribhawono.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Tata Kerja Desa	24
2. Kerangka Pikir	40
3. Logo Pemerintah Desa Sribhawono	61
4. Logo Program <i>Smart Village</i>	64
5. <i>Website Sribhawono Smart Village</i>	67
6. Taman Baca Desa Sribhawono	71
7. Fitur Pengaduan dalam Aplikasi <i>Smart Village</i>	72
8. Pusat Pelayanan Kantor Desa Sribhawono	73
9. Presensi <i>Finger Print</i> Aparat Desa Sribhawono	74
10. <i>Smart TV</i> di Kantor Desa Sribhawono.....	74
11. Fitur Layanan Mandiri <i>Website Smart Village</i> Desa Sribhawono	76
12. <i>Website</i> Desa Sribhawono	81
13. Fitur-fitur dalam <i>Website</i> Desa Sribawono.....	82
14. Situs <i>Website</i> sribawono.metadesa.id	83
15. Bank Sampah Bina Karya Desa Sribawono	85
16. Kendaraan Inventarisasi Bank Sampah Bina Karya Desa Sribhawono.....	86
17. Struktur Bank Sampah Bina Karya	87
18. Fitur Lapak Desa dalam <i>Website</i> Desa	88
19. Status Indeks Desa Membangun Desa Sribhawono	94
20. Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Desa Digital (FKDD).....	97
21. Kunjungan Kementrian Desa ke Desa Sribhawono.....	98

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dengan melaksanakan program dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga merupakan subjek yang berinteraksi langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini juga tidak hanya menangani urusan kewenangan secara formal tapi juga urusan informal seperti adat istiadat, budaya, agama, dan berbagai hal asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sudah semestinya pemerintah desa harus terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan pada tujuan pengaturan pengelolaan desa pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kualitas pelayanan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, oleh sebab itu pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa karena bagaimanapun kepuasan masyarakat adalah tujuan dari sistem pemerintahan yang berjalan. Kualitas pelayanan yang baik juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, kita sebagai masyarakat perlu untuk memahami dan beradaptasi dengan cepat akan adanya kemajuan teknologi yang kian pesat.

Dengan adanya fenomena modernisasi kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah tatanan hidup masyarakat. Bahkan saat ini perkembangan teknologi telah menjadi indikator bagi kemajuan suatu bangsa. Pemerintah dari berbagai tingkatan kini perlu untuk merespon industri 4.0 dengan

menerapkan teknologi di setiap lini tata kelola pemerintahan. Diterapkannya teknologi pada kegiatan pengelolaan masyarakat dapat mempermudah proses pertukaran informasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien (Kurnianingsih *et al* dalam Nur Saidah, dkk. 2021).

Dalam lingkup pemerintahan, diterapkannya teknologi bermula dari adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penerapan *electronic government*. Menurut Saputro (2016), kualitas informasi, sistem, dan layanan berdampak positif pada kepuasan pengguna (masyarakat). Desa adalah sumber pembangunan ekonomi bangsa, karena sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan, oleh sebab itu maka penerapan *e-government* menjadi hal utama yang ditekankan untuk mendorong desa ke arah kemajuan (Ridhawati *et al* dalam Nur Saidah, dkk. 2019).

Pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 83.794 Desa/Kelurahan di Indonesia, oleh sebab itu maka perlu bagi pemerintah untuk berkomitmen membangun Indonesia dimulai dari desa. Digitalisasi desa sangat perlu untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia di Desa agar lebih berkompeten dalam memanfaatkan teknologi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi desa yang dapat mendongkrak kesejahteraan dan melunturkan *image* desa sebelumnya yang identik dengan tertinggal dan terbelakang.

Zaman yang terus berkembang menyebabkan kita ada pada masa modernisasi, arus informasi kini semakin deras menyebar dan cenderung tidak mengenal batasan, tidak hanya pada penduduk perkotaan modernisasi juga dialami oleh masyarakat desa sehingga perlu adanya adaptasi dari pemerintah desa maupun masyarakat dalam rangka menghadapi modernisasi agar tidak dikategorikan keterbelakangan IT atau gagap teknologi.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka perlu juga menerapkan metode pelayanan yang tepat, selain itu bentuk pelayanan juga harus memadukan antara perkembangan zaman dan kebudayaan yang ada di Desa, agar nantinya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tidak luntur karena perkembangan zaman.

Begitu pula dengan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya, perlu adanya pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi dapat berperan sangat penting bagi aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang berbasis digital kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisien baik dalam hal waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya.

Dengan adanya penerapan teknologi informasi (TI) dalam lingkup pemerintahan, telah mendorong adanya beberapa program yang berkaitan dengan implementasi *e-government* yang dilakukan secara masif ke tingkat paling bawah yaitu Pemerintahan Desa. Adanya program *smart village* bentuk upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan sejahtera melalui digitalisasi. Luasnya pemanfaatan teknologi di lingkup pemerintahan mampu mendorong beberapa desa untuk melakukan transformasi struktural menjadi *smart village* melalui integrasi berbagai elemen-elemen pendukung kesinambungan pedesaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (Herdiana, 2019).

Dasar program *smart village* bertumpu pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa

- 1) *Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,*

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 2) *Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.*
- 3) *Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.*

Tujuan dari *smart village* tidak hanya untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat tetapi juga untuk mengintegrasikan seluruh elemen desa menjadi sebuah sistem yang kuat sehingga mampu menjadi peranan penting dalam membantu mencapai tujuan. Menurut Munir (2017), yang selalu identik dengan *smart village* adalah kemampuan desa dalam mengoptimalkan digitalisasi teknologi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perbaikan kualitas hidup, efisiensi, serta meningkatnya kapabilitas desa baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Digitalisasi lambat laun menjadi sebuah keharusan dan bukan lagi sebuah pilihan, seluruh masyarakat harus bisa mengikuti dan beradaptasi adanya perkembangan zaman yang sesuai dengan kebutuhan. Di Provinsi Lampung digitalisasi pemerintahan telah dilakukan hingga tingkat desa, dengan adanya *smart village* yang menjadi salah satu program unggulan dari janji kerja Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim untuk mewujudkan visi “Rakyat Lampung Berjaya”. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 yakni Rakyat Lampung Berjaya. *Smart Village* merupakan program berbasis digital yang diinisiasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan berfokus pada desa melalui gerakan kesadaran masyarakat di Desa yang sadar dan peduli akan perubahan digital dengan melibatkan semua *stakeholders* dan terintegrasi dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Tujuan dari program *smart village* adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Konsep dasar dari *smart village* adalah untuk mengumpulkan karakteristik masyarakat yang ada dan mengintegrasikannya dengan teknologi informasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Selain itu program ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024. Kemudian dilaksanakan melalui Dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, DPMDT Provinsi Lampung bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi paling dasar dari program *smart village* adalah adanya digitalisasi desa dalam tatanan pemerintahan desa, dan penerapan yang paling sederhananya adalah pelayanan terhadap masyarakat yang berbasis digital. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dari para pihak pengelola program (DPMDT Provinsi Lampung) kepada pihak pelaksana (Pemerintah Desa), hal itu diperlukan untuk menunjang keberhasilan program untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat desa cerdas yang ideal di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung secara administratif terdiri dari 14 Kabupaten/Kota dengan 2.423 Desa, 205 Kelurahan dan 225 Kecamatan, melihat dari jumlah tersebut tentunya penerapan program *smart village* di Desa perlu untuk dilaksanakan secara baik dan sistematis. Pemerintah Desa sangat berperan penting dengan adanya *smart village* sebagai aktor dalam mendorong terciptanya *good governance* tata kelola yang baik dengan memadukan antara teknologi informasi dan budaya masyarakat tentunya

sangat penting untuk memudahkan aktivitas pemerintahan desa dengan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Tabel 1. Kondisi *Smart Village* di Provinsi Lampung

NO	Kabupaten/Kota	Kategori Data Wilayah OTDA			Jumlah Desa+KEI	Desa Lokus
		Kecamatan	Desa	Kelurahan		
1	Lampung Barat	15	131	5	136	7
2	Tanggamus	20	299	3	302	7
3	Lampung Selatan	17	256	4	260	18
4	Lampung Timur	24	264	0	264	7
5	Lampung Tengah	28	301	10	311	31
6	Lampung Utara	23	232	15	247	4
7	Way Kanan	15	221	6	227	5
8	Tulang Bawang	15	147	4	151	15
9	Pesawaran	11	144	0	144	12
10	Pringsewu	9	126	5	131	11
11	Mesuji	7	105	0	105	5
12	Tulang Bawang Barat	9	93	3	96	4
13	Pesisir Barat	11	116	2	118	4
14	Bandar Lampung	20	0	126	126	0
15	Metro	5	0	22	22	0
Jumlah		229	2.435	205	2.640	130

Sumber Tabel 1: Dinas PMDT Provinsi Lampung

Di Kabupaten Lampung Timur khususnya di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono digitalisasi merupakan salah satu hal yang ditekankan guna mewujudkan Desa Cerdas. Efisiensi pelayanan terhadap masyarakat menjadi hal yang sangat mendasar untuk ditingkatkan kualitasnya, dan salah satu sarannya adalah dengan *smart village*. Berdasarkan Indeks Desa Membangun, Desa Sribhawono berstatus sebagai Desa Mandiri, selain itu menurut berdasarkan SK Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020 tentang Penetapan lokasi Sasaran *Pilot*

Project Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2020, Desa Sribhawono juga menjadi salah satu dari empat desa yang dipilih sebagai prototipe *smart village*. Empat Desa yang dipilih sebagai prototipe *smart village* yaitu:

1. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
2. Desa Cinta Mulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan
3. Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
4. Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Dengan terpilihnya desa Sribhawono menjadi prototipe *smart village* di Provinsi Lampung menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kondisi penerapan program *smart village* di lokus yang telah penulis tentukan yaitu di Desa Sribhawono. Tata kelola pemerintahan desa yang baik tentunya merupakan usaha dari status desa mandiri yang telah diraih oleh Desa Sribhawono, selain itu strategi yang diterapkan dengan memperhatikan karakteristik dari berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan *smart village* dan bagaimana proses integrasi digitalisasi pelayanannya serta apa saja yang menjadi penghambat penerapan program tentunya menjadi daya tarik dari penelitian yang akan dilakukan dalam rencana penelitian ini.

Setelah kurang lebih selama empat tahun berjalan di Desa Sribhawono, dilaksanakannya program *smart village* tentu saja harus berdampak langsung terhadap masyarakat. Program *smart village* yang menekankan pada digitalisasi pelayanan terhadap masyarakat tentu harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan visi misi program.

Namun, berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat pelayanan administrasi yang masih bersifat manual, contohnya seperti aparatur desa yang melayani masyarakat dengan surat menyurat, selain itu *smart village* adalah suatu program yang berbasis aplikasi dari *website* namun faktanya, *website* yang

seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa justru mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Idealnya, penerapan program *smart village* perlu adanya kombinasi akan dua hal yaitu sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan teknologi dan ketersediaan alat sebagai pelengkap untuk mendorong baiknya kualitas pelaksanaan program. Dalam hal lain, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kebanyakan dari pengguna pelayanan pemerintah desa didominasi oleh masyarakat tergolong usia tua sehingga memungkinkan juga kondisi masyarakat yang kurang melek akan teknologi menjadi penyebab adanya kesenjangan antara pelaksanaan program dengan kondisi ideal yang seharusnya.

Dengan adanya temuan tersebut di lapangan, terdapat sebuah kesenjangan dalam implementasi program *smart village* yang sedang berjalan dengan standar kualitas program, sehingga perlu adanya evaluasi terkait pelaksanaan program *smart village* yang sedang berlangsung. Evaluasi menjadi hal yang ditekankan karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana situasi dan kondisi dari pelaksanaan program, serta apa yang menyebabkan kesenjangan antara program yang dilaksanakan dengan kondisi idealnya. Dalam penelitian ini evaluasi akan ditujukan pada pelaksanaan program *smart village* yang sedang berlangsung di Desa Sribhawono tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, selain itu hasil yang di dapat dari penelitian ini murni dari fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai program *smart village* yang menjadi referensi dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Saidah, dkk. (2021) dengan judul “Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program *Smart Village*”, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif *clustering*. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa suksesnya penerapan program *smart village* di Desa Kradegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo adalah dengan menerapkan tiga tahap yaitu tahap pertama membentuk kelembagaan yang memadai, tahap kedua persiapan SDM, dan tahap ketiga yaitu penyiapan infrastruktur teknologi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Kencono (2021) dengan judul “Penerapan *Smart Governance* dalam *Smart Village* di Kelurahan Dlingo, Kabupaten Bantul”. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan penerapan program *smart village* di Kelurahan Dlingo adalah dengan mengaplikasikan tiga aspek pada *smart governance* menurut Kominfo yaitu *public service*, *transparency*, dan *policy*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursetiawan (2020) dengan judul ”Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis *Smart Village*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan lokus pada penelitian ini berada di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *smart village* di Desa Karangkamulyan telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi serta pelayanan mandiri yang dikhususkan bagi masyarakat dengan mengakses *website* desa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Fitriana, dkk. (2021) dengan judul “Evaluasi Formulasi Kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung”. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi dari kebijakan menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai formulator kebijakan yang berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta harmonisasi peraturan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vincentius Paulinus, dkk. (2019) dengan judul “Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Smart Kampung di Desa Ketapang telah melakukan empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan dan tahap monitoring dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi pada berbagai tahapan tersebut adalah kepemimpinan, teknologi, dukungan warga dan alokasi anggaran.

Penelitian di atas dapat dijadikan oleh penulis sebagai referensi penelitian mengenai penerapan program *smart village*, selain itu penelitian terdahulu yang tertera juga dapat dijadikan sebagai contoh dari penerapan program yang berhasil diimplementasikan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada aspek evaluasi pada program *smart village* yang sedang berlangsung di Desa Sribhawono. Jenis evaluasi yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah evaluasi formatif menurut Dale dalam Sulastri, dkk. (2017) dengan mengutamakan pada tiga indikator utama yaitu relevansi, efektivitas, dan dampak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis telah merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Program *Smart Village* di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan maka Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program *Smart Village* di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai program *smart village*, serta sebagai kajian mengenai kebijakan dalam evaluasi pelaksanaan program *smart village* di Desa Sribhawono.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa Sribhawono, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah desa khususnya dalam penerapan program *smart village*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Evaluasi

2.1.1 Pengertian dan Model Evaluasi

Menurut Dale dalam Sulastri, dkk. (2017) evaluasi secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang bersifat menyeluruh, dilaksanakan pada waktu tertentu terhadap suatu program atau hasil-hasil yang dicapai oleh suatu organisasi pelaksana program. Fokus dari kegiatan evaluasi selain pada dampak implementasi adalah relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan replikasi program.

Menurut Tague-Sutelife dalam Rinaldi (2015) evaluasi tidak hanya menilai suatu aktivitas secara spontan saja tetapi juga menilai secara terencana sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Sedangkan menurut Dunn dalam Rianda (2015) evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi program merupakan kegiatan mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula, evaluator adalah sebutan dari orang yang melakukan evaluasi. Dan tujuan dari evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen maupun subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya serta menentukan tindak lanjut dari program tersebut (Arikunto dan Cepi, 2014).

Menurut Sukardi (2015) dalam evaluasi sebuah program terdapat beberapa model evaluasi yang bisa digunakan, berikut adalah berbagai model evaluasi:

1. Model Tyler

Yaitu model yang menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan pada tujuan instruksional.

2. Model Bebas Tujuan

Merupakan model yang mengharuskan evaluator tidak perlu mengetahui tujuan dari objek yang dievaluasi.

3. Model *Context Input Process Product (CIPP)*

Adalah model yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan alternatif dan penindak lanjutan konsekuensi dari suatu keputusan.

4. Model *Countenance*

Merupakan model yang menekankan pada dua standar yaitu standar absolut dan standar relatif.

5. Model Formatif dan Sumatif

Model formatif digagas oleh Michael Scriven, model ini dilakukan pada saat program sedang berlangsung untuk mengetahui sejauh mana program telah berlangsung, selain itu, hasil dari evaluasi formatif umumnya adalah sebagai bahan masukan untuk pihak pengelola agar program yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. Sedangkan untuk sumatif dilakukan setelah program berakhir dengan tujuan mengukur ketercapaian program.

6. Model *Connoisseurship* atau model ahli

Merupakan model yang menggambarkan penyimpangan dari metodologi yang telah dieksploitasi oleh para praktisi evaluasi.

2.1.2 Evaluasi Formatif

Umumnya pengertian dari evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program sedang berjalan. Model evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar hasil evaluasi dapat menjadi nilai koreksi/perbaikan penyempurnaan program, sehingga kinerja program diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Selain itu manfaat evaluasi formatif juga dapat mengoptimalkan hasil dari program yang sedang berjalan sehingga dapat menciptakan keberlanjutan dan kemandirian program. (Sulastrri Sardjo, dkk. 2017)

Model evaluasi formatif dilaksanakan untuk memberi rekomendasi bagi *stakeholders* hasil evaluasi formatif akan menjadi masukan untuk perbaikan program. Kesempurnaan sebuah program yang sedang berjalan sangat penting bagi diadakannya evaluasi formatif. evaluasi formatif bagi suatu program pembangunan erat kaitannya dengan aspek sosiologis yaitu partisipatif, model evaluasi partisipatif mengandung kekuatan sosial bagi program pembangunan. Dalam program pembangunan sosial, kegiatannya akan menghasilkan respon yang berpengaruh terhadap relasi sosial dari pihak yang terlibat dalam implementasi program, termasuk kelompok sasaran. Dale dalam Sulastrri (2017), Menekankan bahwa evaluasi bisa saja terkait dengan pemberdayaan dalam konteks program pengembangan kapasitas, oleh karena itu evaluasi mencakup kinerja organisasi, sehingga evaluator dapat melakukan asesmen atau evaluasi internal.

Dalam studi evaluasi formatif yang melibatkan partisipasi masyarakat menurut Steven E. Mayer dalam Sulastrri (2017), dalam pelaksanaannya akan menghasilkan mekanisme-mekanisme yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pihak pengelola bagi keberlanjutan dan keandirian program, karena dalam prosesnya evaluasi ini akan:

1. Membantu menciptakan lingkungan yang konstruktif bagi partisipasi dalam kegiatan evaluasi,
2. Memberikan kesempatan bagi kelompok sasaran untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung,
3. Membantu komunitas untuk memanfaatkan hasil evaluasi yang selanjutnya dapat memperkuat tanggapan serta dukungan warga terhadap program yang diimplementasikan.

Untuk menghasilkan evaluasi yang berkualitas maka evaluator perlu juga untuk memahami secara rinci bagaimana program yang sedang berjalan, dengan demikian terdapat level analisis, yang mana tiap level dari analisis tersebut mempunyai berbagai permasalahan yang berbeda, selain itu level analisis juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan bagaimana hasil evaluasi. Pembagian level analisis tersebut menurut Dale ialah:

1. Level Program (Kinerja Program)

Pada level ini Dale menekankan pada beberapa aspek cakupan yang terkandung dalam kinerja program yang meliputi:

- a. *Relevance*

Tujuan dari relevansi adalah untuk mengevaluasi bagaimana kesesuaian program baik dari pengelola program (internal) dan kelompok sasaran program maupun dari pemangku kepentingan yang secara eksternal terkait dengan pelaksanaan program. Kesesuaian visi dan misi serta pedoman dari *stakeholders* yang terlibat akan memberikan dampak positif jika program pembangunan komunitas sangat sesuai (relevan). Dalam hal ini relevan berarti sesuai, hal ini dapat digambarkan dengan kesesuaian program yang sedang berjalan dengan visi-misi dari pengelola program.

Kesesuaian visi-misi dari pihak pengelola akan memberikan dampak positif bagi hasil evaluasi. Apabila program yang

sedang dilaksanakan sesuai dengan visi-misi dari institusi pengelola maka program dapat dikatakan relevan. Sebuah riset evaluasi menunjukkan bahwa semua pengelola dilibatkan dalam program pengembangan komunitas umumnya memiliki kesesuaian dengan visi dan misi, bahkan pada kasus ini yang menarik adalah lembaga utama ikut berpartisipasi dalam rencana strategis. Selain itu, jika program sangat strategis dan merupakan kebutuhan semua pihak maka semua *stakeholders* memiliki kepentingan terhadap program tersebut, misalnya program kemiskinan, pelestarian hutan, dsb. Misalnya, program yang telah diupayakan bertahun-tahun namun berskala kecil, kemudian muncul ide dan memiliki rencana untuk memperluas cakupan program maka umumnya semua pihak tertarik dan merasa peduli untuk terlibat.

b. *Effectiveness*

Efektivitas dievaluasi dimulai dari tingkatan individu yang menjadi sasaran program. Hal ini dapat diketahui secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam tentang seberapa besar manfaat dari program yang sedang berjalan. Dengan melakukan hal tersebut maka evaluator dapat mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan tuntutan *output* program.

Efektivitas berkaitan dengan manfaat bagi kelompok sasaran program. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam dengan kelompok sasaran program (masyarakat). Apabila suatu program yang sedang berjalan bermanfaat bagi kelompok sasaran program dan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam program maka hasil evaluasi akan menyatakan bahwa program yang sedang berjalan efektif.

Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program maka wawancara merupakan alat yang penting bagi evaluator untuk menanyakan seberapa besar manfaat dari program bagi kelompok sasaran. Informasi efektivitas dari pelaksanaan program juga sebaiknya dilakukan secara multi-pihak untuk menggali informasi lebih dalam, misalnya bagi pihak pengelola informasi mengenai efektivitas dapat ditanyakan berkaitan dengan pemanfaatan biaya untuk keberlangsungan pelaksanaan program, bagaimana cara untuk menjangkau suatu program agar bermanfaat bagi masyarakat, dan sebagainya.

c. *Impact*

Secara keseluruhan dampak program pembangunan seharusnya memberi manfaat langsung dan tidak langsung baik terhadap kelompok sasaran maupun warga komunitas di luar kelompok. Dampak program pembangunan dapat memiliki dampak positif sebagai manfaat dan dapat memberikan dampak yang negatif sebagai akibat dari pengelolaan kegiatan implementasi yang tidak maksimal. Umumnya akan diperoleh dari berbagai informasi tentang pelaksanaan program, sistem komunikasi, sosialisasi program, upaya pemberdayaan masyarakat sebagai dampak program. program pembangunan yang ada di komunitas kelompok sasaran diharapkan saling berhubungan sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal yang menjadi sasaran dan juga berdampak untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan program pembangunan masyarakat lokal akan dikomunikasikan kepada masyarakat luas melalui komunikasi eksternal dari pengelola program.

Dampak juga berkaitan dengan relevansi, apabila suatu program yang berjalan sesuai atau berjalan selaras dengan apa yang menjadi pedoman, maka dampak akan dirasakan oleh kelompok sasaran, dampak juga sebaiknya bersifat menyeluruh bagi kelompok sasaran dan berkelanjutan.

Program yang sedang berjalan seharusnya dapat berdampak positif bagi kelompok sasaran. Kegiatan evaluasi program terhadap dampak juga harus melihat perbandingan antara kondisi sebelum diberlakukannya program dan kondisi setelah diberlakukannya program. Dampak tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti program yang sedang berjalan dampaknya dapat dirasakan dan disadari secara langsung oleh kelompok sasaran, misalnya adanya program *smart village* dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat karena digitalisasi dalam program ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan mudah karena hanya bermodalkan gadget masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus mengantri.

Secara tidak langsung berarti dampak dari suatu program yang sedang dilaksanakan seolah-olah tidak disadari oleh kelompok sasaran yang berkaitan dampak program secara lebih luas. Contohnya adanya program *smart village* secara tidak langsung dapat menghemat waktu dan biaya dari masyarakat karena apabila masyarakat membutuhkan pelayanan dapat dilakukan dimanapun karena pelayanan berbasis aplikasi yang ada di gadget.

d. *Sustainability*

Keberlanjutan program pembangunan dievaluasi setelah tahap implementasi telah selesai dilakukan, untuk mengevaluasi seberapa besar program pembangunan dapat terus berlanjut. Keberlanjutan program dapat dinilai baik oleh kelompok sasaran pada saat studi evaluasi formatif telah dilakukan baik oleh, kelompok sasaran, organisasi pengelola, *stakeholders* utama maupun pihak luar selain pengelola. Umumnya keberlanjutan dikaitkan dengan pengelolaan program namun juga terkait dengan masa periode program.

Dalam cakupan keberlanjutan, potensi komunitas lokal dapat menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam sebuah komunitas merupakan hal yang sangat menentukan bahwa program dapat dikatakan *sustainability* atau tidak.

e. *Replicability*

Secara umum maksud dari replikasi adalah jika dalam penggunaan penelitian dengan objek dan metode yang sama, maka hasilnya sama. Apabila dikaitkan dengan indikator program maka apabila program yang diterapkan menggunakan metode yang sama maka tentunya program bersifat replikabilitas dan hasil penerapan program akan bersifat sama atau tidak jauh beda. Jadi yang ditekankan pada replikabilitas adalah pada aspek kesamaan metode dan objek. Dalam program pembangunan sosial, variabel replikabilitas ini memang tidak mudah karena kondisi sosial, ekonomi, budaya setiap komunitas yang tidak sama (homogen).

Terdapat empat cakupan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu, *relevance*, *effectiveness*, *impact*, *sustainability*. Argumentasi peneliti tidak mencantumkan cakupan *replicability* karena dalam penelitian ini yang menjadi *locus* penelitian program *smart village* hanya Desa Sribhawono, sedangkan dalam cakupan *replicability* terdapat variabel kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari berbagai komunitas dalam beberapa lokasi sehingga untuk mencantumkan cakupan *replicability* penelitian seharusnya bersifat komparatif atau mencari kesamaan dengan metode penelitian yang sama dan memerlukan beberapa lokasi penelitian yang menjadi objek.

2.1.3 Metode Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anugrah Dwi (2023) metode evaluasi kebijakan publik adalah pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja, efektivitas, dan dampak dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan.

Lebih lanjut Anugrah Dwi juga menjelaskan metode evaluasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Anugrah Dwi (2023) beberapa metode evaluasi yang umum digunakan meliputi:

1. Analisis kuantitatif

Dalam metode ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan statistik dan analisis data kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan. Metode ini melibatkan pengumpulan data numerik seperti data statistik, angka-angka, dan indikator kinerja yang terkait dengan program yang dievaluasi.

2. Analisis Kualitatif

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti pendapat, persepsi, dan wawasan dari pemangku kepentingan terkait kebijakan. Metode kualitatif dapat melibatkan studi kasus, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan analisis konten dokumen atau laporan terkait kebijakan.

3. Analisis biaya-manfaat

Metode ini berkaitan dengan penilaian komprehensif terhadap biaya dan manfaat yang terkait dengan kebijakan. Analisis biaya-manfaat digunakan untuk mengevaluasi secara ekonomi apakah manfaat yang dihasilkan dari kebijakan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menerapkannya. Pendekatan ini memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung serta manfaat ekonomi dan sosial diukur secara moneter.

4. Evaluasi Partisipatif

Metode ini melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dan kelompok sasaran program dalam proses evaluasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang terlibat dapat berkontribusi dengan pendapat, pengalaman, dan perspektif mereka untuk membantu mengukur dampak kebijakan dan memahami bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi mereka secara langsung.

5. Evaluasi *Impact Pathway*

Metode ini melibatkan pemetaan dan pemahaman menyeluruh tentang jalur hubungan kausal antara kebijakan dan dampak yang diharapkan. Metode evaluasi jenis ini membantu mengidentifikasi input, aktivitas, keluaran, hasil dari kebijakan, dan hubungannya dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Menurut Edward A. Suchman langkah-langkah yang diterapkan dalam mengevaluasi kebijakan terdiri dari: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Dari ke enam tahap tersebut menurutnya mengidentifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial.

Pada penelitian ini analisis yang akan diterapkan lebih tertuju pada metode analisis kualitatif dan partisipatif karena data yang akan dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat non-numerik dan berasal dari berbagai pihak partisipan yaitu dari pihak pengelola maupun kelompok sasaran. Sedangkan model evaluasi yang dipilih adalah model evaluasi formatif karena dilakukan saat program sedang berlangsung dan untuk mengetahui sejauh mana program telah berlangsung.

2.2 Desa dan Pemerintahan Desa

2.2.1 Desa

Menurut Kusnaedi (2006) desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta mempunyai serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.

Menurut H.A.W. Widjaja (2009) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Yang menjadi landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Wewenang desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

2.2.2 Pemerintah Desa

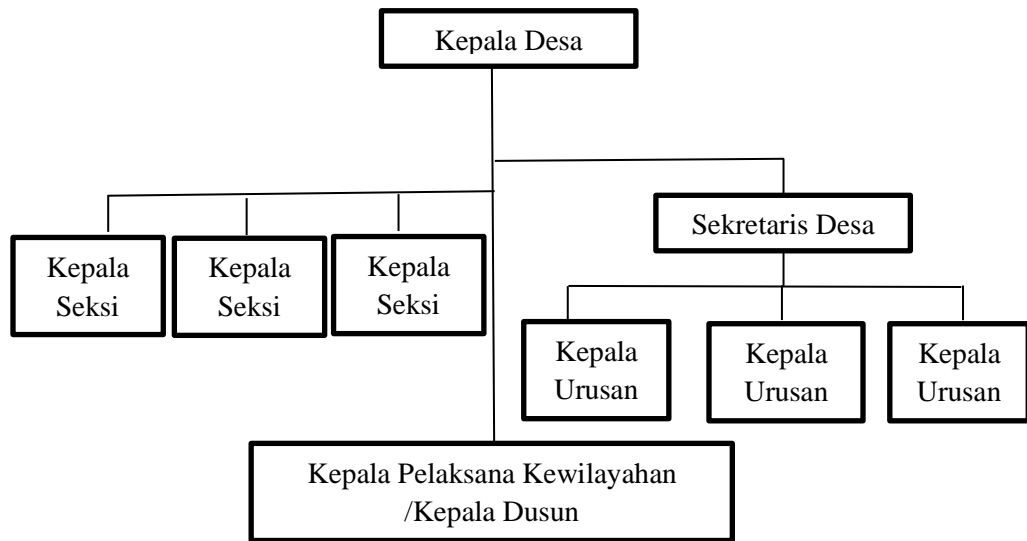
Pemerintah Desa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Penyelenggaraannya

Pemerintah Desa sebagai subjek dari rangkaian sistem yang berjalan, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan suatu desa dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketertaman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.

Berkaitan dengan struktur pemerintahan desa, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK Desa), yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Kerja Desa
 Sumber : Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh tiga kepala seksi dan sekretaris yang dibantu tiga kepala urusan, masing masing memiliki tugas dengan visi yang tidak jauh dari kesejahteraan masyarakat dengan beragam misi, secara umum tugas dari kepala desa dan perangkatnya adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Tugas Sekretaris Desa
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas Kepala Urusan
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Tugas Kepala Seksi
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya kerja sama antar perangkat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain itu adanya sinergitas kinerja dari aparat pemerintah desa juga berguna untuk menjadikan status desa yang lebih baik agar desa tidak dikategorikan tertinggal atau sangat tertinggal. Berikut adalah klasifikasi status desa berdasarkan indeks desa membangun, yaitu:

1. Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155.
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
3. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal

mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang dimiliki. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Desa Sribhawono yang terletak di Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur berstatus sebagai desa mandiri dengan indeks desa membangun mencapai 0,8160. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Desa Sribhawono telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melaksanakan program untuk mencapai visi. Namun masih perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi yang sebenarnya serta strategi apa yang diterapkan oleh aparatur desa agar dapat meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yang diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik sehingga kesejahteraan memang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak hanya secara kuantitas belaka.

2.3 Teknologi Informasi

2.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi muncul dan semakin berkembang karena adanya modernisasi yang terjadi secara global. Pada sekarang ini adanya teknologi informasi berguna bagi berbagai bidang tak terkecuali pada sistem pemerintahan. Perubahan sistem pelayanan yang mengarah kepada digitalisasi sudah menjadi keharusan bagi semua organisasi pemerintahan baik dari yang tertinggi maupun terendah.

Warsita (2008) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna.

Sedangkan menurut Kadir (2018) secara garis besar teknologi informasi dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dapat menggantikan peran manusia yaitu dalam melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, teknologi informasi dapat memperkuat peran manusia yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Dan yang terakhir teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Sudaryono dan Astuti juga berpendapat bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan manfaat yang diperoleh dengan adanya teknologi informasi antara lain dapat menghemat biaya dan waktu, meningkatkan produktivitas, dan akurasi informasi yang lebih baik.

Information Technology atau teknologi informasi menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) dalam

Sutarman (2009) adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.

Dari berbagai teori menurut ahli mengenai teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat modern yang terdiri dari tiga unsur yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*useware*) yang digunakan untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan karena dapat membantu mengefisiensikan biaya, waktu, tenaga, dan hal-hal operasional lainnya.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi

Fungsi teknologi informasi menurut Sutarman terbagi dalam enam fungsi yakni sebagai berikut:

1. Menangkap (*Capture*)

Yaitu proses menerima data yang nantinya akan menjadi data masukan.

2. Mengolah (*Processing*)

- a. Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard*, *scanner*, dan sebagainya.

- b. Mengolah data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pemrosesan data dapat berupa konversi data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, sintesis (penggabungan segala bentuk data dari informasi).

Data processing, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi. Proses informasi adalah suatu bentuk kegiatan komputer yang memproses atau mengolah suatu bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi bentuk yang lain dari informasi

Multimedia system, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).

3. Menghasilkan (*Generating*)

Merupakan tahap mengasihkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna seperti laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu memori yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

5. Mencari Kembali (*Retrival*)

Menelusuri, atau mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan.

6. Transmisi (*Transmission*)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer.

Lebih lanjut Sutarman (2009) juga mengemukakan tujuan dari teknologi informasi yakni sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan masalah.
2. Untuk membuka kreativitas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

2.3.3 Komponen Teknologi Informasi

Komponen adalah bagian keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan, dikaitkan dengan teknologi informasi, komponen juga dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang dapat membentuk kesatuan alat yang berguna bagi manusia. Komponen teknologi Informasi menurut Sutarman (2009) terdiri dari:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
Yaitu kumpulan peralatan seperti processor, monitor, keyboard, printer, dan sebagainya yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan menampilkan data.
2. Perangkat Lunak (*Software*)
kumpulan program-program komputer yang terdapat di dalam *hardware* yang memungkinkan sistem mengolah data. Biasanya berupa program sistem aplikasi.
3. Basis Data (*Data Base*)
Sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan rekaman yang menyimpan data.
4. Jaringan dan Komunikasi (*Network*)
Sebuah sistem yang saling terhubung yang dapat menunjang pemakaian bersama sumber diantara komputer-komputer yang berbeda.
5. Sumber Daya Manusia (*People*)
Elemen yang paling penting dalam teknologi informasi, yang menjalankan sistem dan menggunakan sistem.

2.3.4 Kelebihan Penerapan Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2019) terdapat beberapa keuntungan dari diterapkannya teknologi informasi, yaitu:

1. Kecepatan
Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi informasi proses kerja akan lebih cepat dari mulai proses menerima, mengolah, maupun menyampaikan informasi.
2. Konsistensi
Dengan diterapkannya teknologi informasi akan menghasilkan *output* yang konsisten sesuai dengan standar yang diterapkannya, walaupun pengolahan bersifat fleksibel.

3. Ketepatan

Dengan memanfaatkan teknologi informasi akan menjadikan hasil lebih akurat dan tepat, sistem yang digunakan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan manusia sehingga menghasilkan informasi yang presisi.

4. Keandalan

Apa yang dihasilkan teknologi informasi melalui perangkat yang ada dapat menghasilkan *output* yang valid sehingga hasil yang didapat dapat diandalkan namun hal ini dapat dicapai dengan didukung sumber daya manusia yang kompeten.

2.4 Konsep Smart Village

2.4.1 Pengertian Smart Village

Menurut Halim Iskandar dilansir dari detiknews (2021), *Smart Village* adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa dapat melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk kategori Desa Mandiri. Lebih lanjut Program Smart Village adalah suatu program yang mengandalkan *internet of things* (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi, tetapi harus selaras dengan tradisi dan budaya yang ada di Desa, sehingga proses pembangunan desa ini adil dan sesuai dengan dinamika masyarakat desa.

Smart kampung atau *smart village* merupakan pengembangan konsep dimana masyarakat desa berada dalam suatu komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku (Baru dkk, 2019).

Menurut Bappenas (2021), *smart village* adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal/SDGs*).

Fokus penerapan *smart village* tidak hanya pada kecanggihan teknologi saja, namun lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya dan teknologi yang ada untuk dimaksimalkan pengelolaannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan perubahan pada kondisi desa yang lebih baik dan sejahtera. Karakteristik wilayah desa, budaya, masyarakat yang homogen, menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019)

2.4.2 Landasan Program *Smart Village*

Dasar program *smart village* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Definisi *smart village* sesuai dengan Pasal 78 UU Desa sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintah daerah mendorong dan menyediakan perangkat jaringan informasi yang dapat meningkatkan pembangunan di desa. Sedangkan untuk Provinsi Lampung landasan hukum penerapan program *smart village* terdapat pada Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024.

2.4.3 Sasaran Program Smart Village

Menurut Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village di Provinsi Lampung, program ini ditujukan pada desa atau istilah lainnya dalam definisi desa, di 13 Kabupaten terpilih yang ada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village BAB II Pasal 3 sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah desa yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung. Desa yang menjadi sasaran Smart Village ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Indeks Desa Membangun.

Penentuan dan penetapan jumlah lokasi (*locus*) desa sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan: Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas/Badan Daerah Kabupaten yang mengurus desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) dan pertimbangan Tim Pendamping Desa. Secara teknis penentuan *locus* program *smart village* ditentukan melalui:

1. Usulan masyarakat melalui Pemangku Kepentingan di tingkat Provinsi Lampung antara lain melalui media Musrenbang, Penjaringan Aspirasi, rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain-lain.
2. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan agenda kerja, program kegiatan di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten.
3. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.
4. Lokasi Desa *locus*/sasaran *Smart Village* ditentukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

2.4.4 Strategi Pelaksanaan *Smart Village*

Strategi atau metode yang dilakukan untuk pelaksanaan *smart village* adalah melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

1. *Comprehensive Approach*

Pendekatan untuk mendapatkan pemecahan menyeluruh dari aspek yang terkait untuk perencanaan, yaitu diaplikasikan melalui pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai aspek ada sebagai bagian proses perancangan secara proporsional sesuai kebutuhan.

2. *Integrated Approach*

Pendekatan untuk memadukan berbagai kepentingan/pihak/aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi rancangan pra desain penataan. Hal ini akan diimplementasikan

melalui kegiatan-kegiatan diskusi maupun koordinasi dengan pihak yang berkepentingan (Pelaku, Pemangku Kepentingan di daerah, maupun Narasumber) yang akan dilakukan selama waktu perencanaan. Dalam kesempatan tersebut diupayakan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan mutu hasil rancangan.

3. *Realistic Approach*

Pendekatan yang memadukan antara pertimbangan ideal dan pragmatis agar diperoleh pemecahan atau arahan perencanaan pra desain yang implementatif dan kontekstual.

2.4.5 Prinsip Smart Village

1. Prinsip Umum *smart village*

- a. Sistem yang dibangun melalui program *smart village* harus dapat dipergunakan oleh Desa sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan publik dan bertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan Desa dan pelayanan publik.
- b. Sistem yang dibangun melalui program *smart village* harus memudahkan dan dapat dimanfaatkan pemerintah supra desa (Provinsi dan Kabupaten) untuk memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap memberikan kebebasan desa maupun Kabupaten menentukan data-data lain yang memang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan desa yang sangat bervariasi dalam menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.
- c. Sistem yang dibangun melalui program *smart village* harus memperkuat dan mengonsolidasikan sistem informasi yang sudah ada atau sedang dibangun, baik ditingkat Desa, Kabupaten, hingga Provinsi.

2. Prinsip Khusus *Smart Village*

Implementasi sistem berangkat dari apa yang menjadi potensi desa, kemudian dimulai dengan memetakan jenis pelayanan yang diberikan, sistem yang sudah dan potensi desa dapat menjadi daya dukung *smart village*. Berdasarkan hal tersebut berikut adalah prinsip khusus dari smart village:

a. Informasi data generik minimum

Semua desa mengelola jenis data yang sama diluar dari daftar generik minimum tersebut, desa-desa dapat saja mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasa perlu, misal potensi wisata desa dan sebagainya.

b. Berbasis Platform

Sistem dan aplikasi *smart village* berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa dan mudah dikembangkan dari segi teknologi informasi.

c. Rutin

Memastikan data diperbarui secara rutin atau bahkan *real-time*. Staf Pengelola yang bertanggungjawab bersifat tetap.

d. Keberlanjutan

Kebutuhan terhadap data bersifat terus-menerus sehingga pengembangan sistem *smart village* harus disertai komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya, termasuk komitmen daerah untuk mereplikasinya.

e. Mudah

Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desa sehingga mudah untuk dikelola. Sistem juga perlu dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

f. Nilai Tambah

Sistem dan aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam *smart village* memberikan nilai tambah dibandingkan sistem informasi desa tradisional manual, antara lain

memungkinkan adanya interkoneksi elektronik tanpa menghilangkan aspek keamanan data yang bersifat rahasia atau pribadi.

g. Satu Data Untuk Semua (*entry*)

Menganut prinsip open data, dibarengi dengan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.

h. *User Friendly*

Dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas perangkat desa dan masyarakat pengguna informasi.

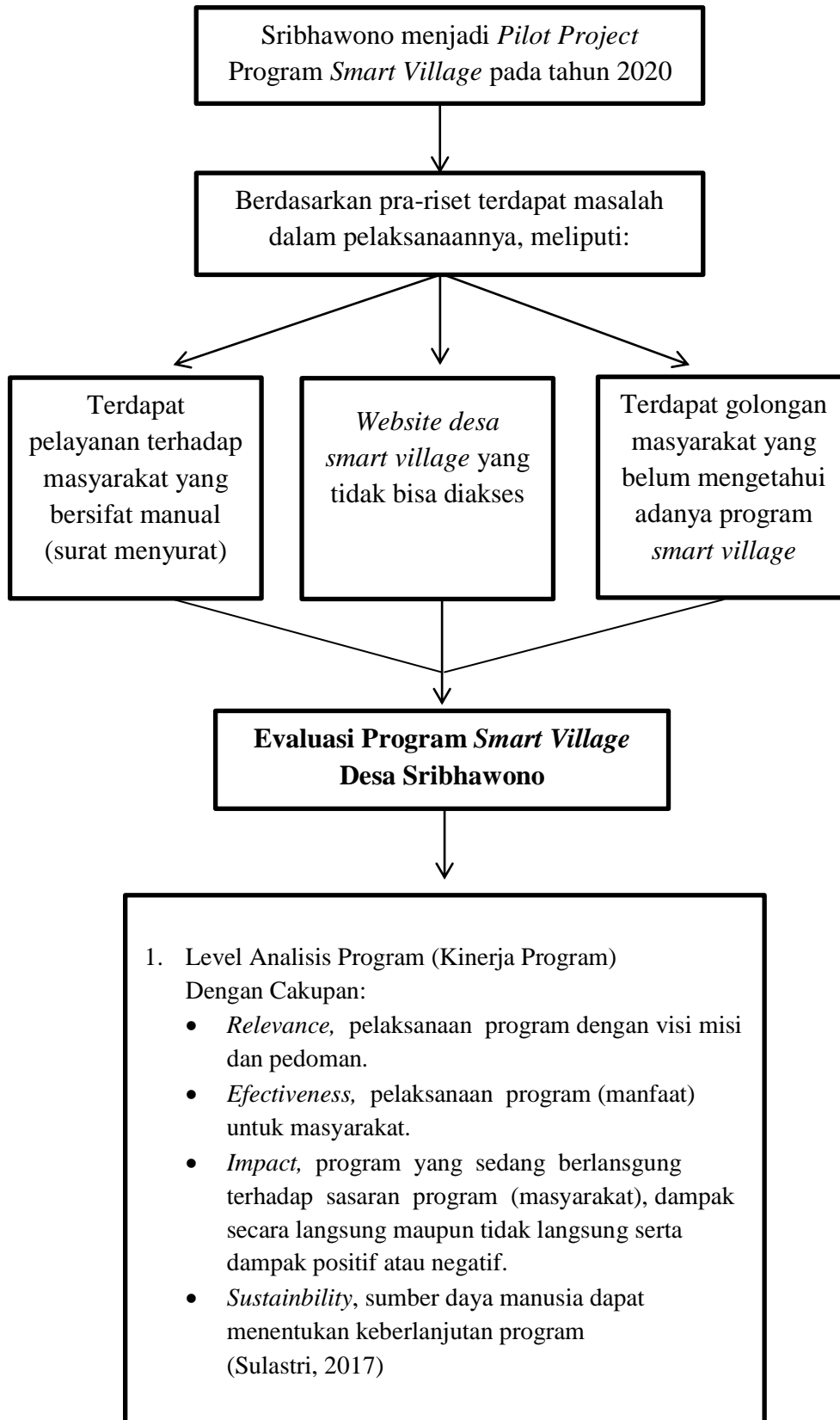
2.5 Kerangka Pikir

Fenomena perkembangan zaman yang mendorong modernisasi menyebabkan diterapkannya digitalisasi dalam ruang lingkup pemerintahan desa dengan adanya program *smart village*. Di Provinsi Lampung program *smart village* diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2020. Sasaran dari program ini ialah meningkatnya jumlah desa yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

Khusus untuk desa Sribhawono implementasi program *smart village* sudah terlaksana dengan adanya SK Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020 yang menjadikan desa Sribhawono sebagai salah satu desa *pilot project* dari pelaksanaan program *smart village*. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa program yang menjadi salah satu janji kerja Gubernur Lampung tersebut telah dilaksanakan di *locus* yang peneliti pilih. Namun pada pelaksanaannya fakta di lapangan menunjukkan terdapat pelayanan yang masih bersifat manual, *website smart village* yang tidak bisa diakses, serta masih terdapat golongan masyarakat yang belum mengetahui adanya program *smart village*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program *smart village* di Desa

Sribhawono. evaluasi formatif menurut Dale dalam Sulastri, dkk. (2017) akan menjadi model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cakupan analisis meliputi, *relevance*, *effectiveness*, *impact*, dan *sustainability*.



Gambar 2. Kerangka Pikir.

Sumber : diolah peneliti.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai hal-hal terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Pengumpulan data bersifat non-numerik telah dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan program *smart village* yang dilaksanakan di Desa Sribhawono.

Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan di lokasi dimana peneliti mengalami masalah atau masalah yang diteliti. Informasi yang dikumpulkan benar-benar berbicara langsung dengan orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka, dan hal tersebut merupakan karakteristik utama dari penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena cocok untuk mengetahui dan menggambarkan secara rinci mengenai bagaimana dan sejauh mana program *smart village* telah dilaksanakan di Desa Sribhawono, selain itu peneliti juga telah menganalisa bagaimana Evaluasi Program *Smart Village* Desa Sribhawono.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Maret 2024. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan desa Sribhawono merupakan salah satu desa mandiri yang menjadi *pilot project* pelaksanaan program *smart village* dan peneliti juga menemukan beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan program, selain itu desa Sribhawono juga merupakan tempat tinggal dari peneliti.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:18) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata/teks atau gambar dan bukan berupa angka. Terdapat dua sumber data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer yang didapatkan secara langsung dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung misalnya melalui dokumentasi.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari narasumber dan teknik yang digunakan adalah wawancara kepada informan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa data primer yaitu tentang Evaluasi Program *Smart Village*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang dapat diperoleh dengan mengkaji dari karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel, dan dokumentasi lainnya yang tersedia dan dipublikasikan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa data sekunder yang terdiri dari dokumen pelaksanaan *smart village*, dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program *smart village*, serta pustaka yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus peneliti tidak jauh dari rumusan dan tujuan penelitian, peneliti berfokus pada evaluasi formatif terhadap program *smart village* yang dilakukan dengan analisis pada level program dengan tiga cakupan yaitu:

1. *Relevance*, yaitu kesesuaian program dengan pelaksanaan yang meliputi kesesuaian program dengan :
 - Visi Program *smart village* merupakan program terjemahan dari visi Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu:
“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing sejahtera)”
 - Misi program *smart village* masuk pada janji kerja ke- 30 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Arinal-Nunik yaitu:
Smart Village:
 - a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa;
 - b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa;
 - c. *e-participation*; melibatkan masyarakat hingga pelosok perdesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan/atau aplikasi.
2. *Effectiveness*, menganalisis manfaat program dengan pendekatan multipihak untuk memahami:
 - Seberapa besar manfaat program bagi kelompok sasaran (masyarakat)
Berkaitan dengan program *smart village*, maka manfaat dapat ditinjau melalui tiga aspek yaitu:
 - *Smart government* (pelayanan digital kepada masyarakat)
 - *Smart economy* (peningkatan ekonomi melalui inovasi)

- *Smart people* (masyarakat digital)
3. *Impact*, adalah fokus untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan setelah adanya program terhadap masyarakat yang terdiri dari:
- Dampak positif
Program berdampak positif apabila pelaksanaan telah relevan dengan visi misi dan pedoman.
 - Dampak negatif
Program dapat berdampak negatif akibat dari implementasi program yang tidak sesuai dengan visi misi.
 - Dampak langsung
Yaitu dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh kelompok sasaran (masyarakat) sebagai hasil dari pelaksanaan program.
 - Dampak tidak langsung
Yaitu dampak yang seolah-olah tidak disadari oleh kelompok sasaran (masyarakat) yang berkaitan manfaat program secara lebih luas.
4. *Sustainability*, yaitu keberlanjutan program yang ditentukan oleh:
- Sumber daya manusia yang kompeten dari pihak pelaksana program
(Berkaitan dengan program *smart village* maka yang menjadi aspek penilaian adalah kompetensi dari operator program serta keikutsertaan dalam bimbingan teknis dari pihak pengelola sebagai upaya peningkatan kompetensi terkait program)
 - Komunitas lokal atau wadah yang dapat menerima adanya perubahan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan.
(Nilai yang menjadi aspek penting berkaitan dengan program *smart village* adalah adanya komunitas atau keikutsertaan dalam komunitas yang menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi)

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) informan adalah individu yang memberikan data yang berkaitan dengan objek penelitian. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode dimana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap mempunyai wawasan yang paling luas tentang topik yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	I Wayan Gunawan, SE.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung.
2.	Yohannes Sulistiono, SE,M.M	Kasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa dan Transimgrasi Provinsi Lampung (Operator Program <i>Smart Village</i>).
3.	Buich Wisnu Prabowo	Kepala Desa Sribhawono
4.	Anvel	Operator Desa Sribhawono
5.	Masyarakat	Perwakilan Masyarakat Desa Sribhawono dari berbagai golongan.

Sumber Tabel 2: Data diolah peneliti

Pada informan penelitian di atas penulis mengambil dari tiga pihak yang terlibat secara langsung dengan program *smart village*. Informan pertama berasal dari pihak pengelola program yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Kemudian dari pihak kedua berasal dari pelaksana program di Desa *locus* yaitu Desa Sribhawono, dan pihak ketiga berasal dari kelompok sasaran program yaitu perwakilan dari beberapa golongan masyarakat Desa Sribhawono.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik sebagai alat untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2020) observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti lingkungan, waktu, lokasi, aktivitas, peristiwa, objek dan tujuan. Observasi dapat menjadi dasar dari peneliti untuk dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati secara langsung implementasi program *smart village* di Desa Sribhawono, selain itu analisa mengenai sejauh mana program sedang berjalan juga akan dikaji penulis secara langsung di lokus yang telah ditentukan tersebut, dengan adanya observasi langsung ini penulis berharap akan mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk evaluasi dari program *smart village* yang sedang berjalan.

Pada tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2024, peneliti telah melaksanakan observasi dengan turun langsung di lokasi penelitian yang terletak di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terkait dengan pelaksanaan program *smart village* di Desa Sribhawono. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa temuan fakta di lapangan yaitu:

Relevance

- Program *smart village* telah dilaksanakan dari tahun 2020 dengan Sribhawono yang menjadi salah satu desa *pilot project* dari program.

- Adanya *website* Sribhawono.id sebagai situs pelayanan terhadap masyarakat merupakan salah satu wujud digitalisasi dalam rangka mewujudkan aspek *smart government*.
- Telah terdapat layanan internet gratis dan perpustakaan di Desa Sribhawono dengan dibangunnya Taman Baca yang terletak di sebelah Kantor Desa Sribhawono, namun dalam pelaksanaannya minat baca masyarakat masih rendah.
- Telah terdapat fitur “Aduan Masyarakat” dalam *website* Desa sebagai wujud implementasi *e-participation* namun fitur ini jarang digunakan masyarakat karena kebanyakan masyarakat melalui laman media sosial Desa Sribhawono sebagai wadah untuk laporan masyarakat.

Effectiveness

- Terdapat gangguan yang menyebabkan *website* Desa Sribhawono.id yang menjadi aplikasi layanan mandiri masyarakat tidak bisa diakses karena server langganan yang error sehingga pelayanan dilakukan secara manual. Namun pada tanggal 10 Maret 2024 *website* Sribhawono.id telah dapat diakses kembali.
- Kebanyakan masyarakat Desa Sribhawono telah melakukan pelayanan dengan akses situs desa sebagai wujud dari aspek *smart people* namun masih terdapat golongan masyarakat tua yang belum paham bagaimana teknis memanfaatkan fitur layanan mandiri pada *website* desa.
- Terdapat salah satu wujud dari implementasi aspek *smart economy* dengan adanya Bank Sampah Bina Karya Desa Sribhawono di Dusun V yang telah memiliki 646 anggota yang berasal dari masyarakat Desa Sribhawono.

Impact

- Efisiensi waktu dan biaya merupakan dampak langsung positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sribhawono karena adanya

program *smart village* dengan tersedianya layanan mandiri pada *website* Desa.

- Dampak tidak langsung dirasakan oleh Pemerintah Desa Sribhawono karena dengan dilaksanakannya program *smart village* menjadikan Desa Sribhawono masuk kategori Desa Mandiri dengan Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 0,8160 yang telah peneliti cek langsung melalui *website* Kementerian Desa.
- Dampak negatif muncul karena terdapat beberapa oknum masyarakat desa yang menyalahgunakan layanan internet gratis untuk bermain judi online, dan langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa adalah dengan pengawasan langsung di Balai Desa Sribhawono dan menonaktifkan internet pada tengah malam.

Sustainability

- Kepala Desa Sribhawono telah merekrut Anvel sebagai operator desa, perekrutan ini dilakukan atas dasar kompetensi dan hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan Anvel yang merupakan lulusan S2 Ilmu Komunikasi.
- Berdasarkan pengamatan peneliti kompetensi Operator Desa Sribhawono ditunjukkan dengan cara berkomunikasi yang baik dan bagaimana pemahaman operator mengenai teknologi informasi serta kemampuannya dalam mengoperasikan *website* desa.
- Operator Desa Sribhawono juga telah masuk dalam anggota Forums Komunikasi Desa Digital (FKDD) yang merupakan wadah untuk terus melestarikan nilai digitalisasi desa, selain itu Anvel sebagai operator desa pun juga telah melaksanakan berbagai bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan informasi dengan interaksi tanya jawab antara narasumber dan pewawancara yang dilakukan melalui panduan (Sugiyono, 2020). Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis telah mengumpulkan data dengan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pihak pengelola program (DPMDT Provinsi Lampung), Kepala Desa dan beberapa perangkat serta masyarakat Desa Sribhawono yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program *smart village* di Desa Sribhawono. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono.

Wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Maret 2024, narasumber dalam penelitian ini berasal dari pihak pengelola program *smart village* yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung, pihak pelaksana program *smart village* yaitu Pemerintah Desa Sribhawono, dan kelompok sasaran program *smart village* yaitu Masyarakat Desa Sribhawono, dengan ringkasan sebagai berikut:

Relevance

- I Wayan Gunawan (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

“Program *smart village* merupakan implementasi dari visi misi Gubernur Provinsi Lampung yang diatur dalam janji kerja ke-30. Kemudian ditunjuknya Desa Sribhawono sebagai lokus *pilot project* karena letak desa yang strategis, masyarakat yang beragam, aparatur desa yang kompeten, dan fasilitas desa yang memadai”.

- Yohannes Sulistiono (Operator Program *Smart Village*)

“Jadi *smart village* adalah program yang menterjemahkan dari visi misi gubernur lampung, atau bahasa lainnya impelmentasinya dari visi misi, selain itu detail terkait pelaksanaan juga diatur di janji kerja gubernur ke- 30 untuk program ini khususnya ada di situ”

- Buich Wisnu Prabowo (Kepala Desa Sribhawono)

”Untuk perpustakaan kita sudah menyiapkan saung atau gazebo di sebelah kantor desa dan kami juga sudah menyediakan buku untuk bacaan, tapi ya tidak disambut baik masyarakat karena memang minat baca bukunya kurang, jadi saya punya ide pasang internet gratis saja supaya bisa literasinya secara digital dan memang tinggal ketik sesuai mau baca apa”.

“Dengan adanya program smart village ini memang sangat memudahkan bagi kami pemerintah desa, karena dalam pelayanannya memang bisa diakses melalui *handphone*, bahkan sekarang kalau minta tanda tangan ga perlu ketemu saya langsung karena bisa melalui barcode”.

“Dalam aplikasi memang sudah ada fitur aduan masyarakat namun dalam pelaksanaannya, masyarakat cenderung memberi aduan atau kritik terhadap saya di grup Facebook ataupun biasanya kalau misal ada laporan langsung menemui saya atau *chat* via WhatsApp”.

Effectiveness

- Yohannes Sulistiono (Operator Program *Smart Village*)

“Jadi yang kami ingin wujudkan dari adanya *smart village* di Lampung ini ada tiga hal yang seharusnya menjadi manfaat yaitu *smart government* yakni ada pelayanan yang lebih cepat, pasti, dan akurat, serta masyarakat dapat informasi jadi lebih cepat, kemudian *smart economy* yang dapat mewujudkan peningkatan ekonomi desa misalnya desa bisa buka lapak dengan memanfaatkan bumdes yang dikolaborasikan dengan kemajuan iptek, dan *smart people* yakni masyarakat desa jadi lebih terampil dengan adanya penguasaan teknologi informasi, dan untuk menjaga agar itu terwujud kami melakukannya dengan *website checking* atau survey langsung ke desa serta koordinasi dengan PTPD (Pembinaan Teknis Pemerintah Desa)”
- Anvel (Operator Desa Sribhawono)

“Sebenarnya dari kami dengan adanya program ini sangat terbantu apalagi saya sebagai operator merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat. Namun memang terdapat masalah untuk kali ini karena server langganan kami yang eror, jadi hal ini menghambat juga karena ya harus balik lagi pelayanan secara manual” (Wawancara 12 Februari 2024)

- Buich Wisnu Prabowo (Kepala Desa Sribhawono)

“Memang adanya program ini sangat membantu bagi kebanyakan masyarakat tapi masih ada PR bagi kami yaitu masyarakat golongan tua yang masih gaptek, dan menganggap kalau pelayanan secara online itu rumit dan mereka kurang paham”.

“Salah satu implementasi *smart economy* dari program *smart village* di Sribhawono adalah dengan adanya bank sampah, yang memang kami juga menganggarkan biaya untuk kendaraan roda tiga sebagai sarana untuk pengumpulan sampah yang nantinya di pilah oleh pengelola yang berasal dari masyarakat”

Impact

- Yohannes Sulistiono (Operator Program *Smart Village*)

”Dampak dari adanya program smart village ini adalah dapat mewujudkan pelayanan yang berbasis digital sehingga secara tidak langsung dapat menghemat atau mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya apabila masyarakat membutuhkan pelayanan dari pihak desa. Dan itu merupakan dampak positif apabila program terwujud, sebaliknya apabila program ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa yang acuh terhadap teknologi maka hanya akan menghambat desa buat mandiri, karena digitalisasi ini perlu maka kalau aparat desanya kurang peduli dengan ini maka desanya susah berkembang, dan hanya menimbulkan penggunaan biaya yang tidak tepat sasaran saja ”.

- Buich Wisnu Prabowo (Kepala Desa Sribhawono)

“Dampak langsung yang dirasakan masyarakat dengan adanya program ini tentunya dapat menghemat waktu dan biaya, karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke desa dapat dilakukan secara online dan hanya tinggal pencet minta *barcode* sudah beres”.

“Selain itu secara tidak langsung adanya program ini menjadikan Desa Sribhawono masuk kategori desa mandiri karena indeks desa membangunnya naik, tentunya ini merupakan nilai positif bagi kami, karena sebelumnya waktu saya menjabat sebagai Kepala Desa, Sribhawono ini masih dikategorikan sebagai desa maju, dan alhamdulillah karena digitalisasi dan pembangunan di berbagai sektor kita laksanakan Desa Sribhawono masuk menjadi kategori desa mandiri ”.

“Mungkin dampak negatif dari program ini adalah dengan adanya sarana internet gratis itu kan memang sangat bebas dan ga terbatas, jadi kadang dibuat main judi online dan itu cukup meresahkan. Dari itu saya akhirnya setiap malam ke balai desa untuk mengawasi dan sekitar tengah malam internet desa kita nonaktifkan dan dihidupkan kembali pada jam kerja”.

Sustainability

- Yohannes Sulistiono (Operator Program *Smart Village*)

“Sumber daya manusia itu berperan sangat penting pada pelaksanaan program ini, ya karena untuk menjalankan program ini perlu operator yang siap dan terampil, kemudian dibantu juga adanya bimbingan teknis dari kami kepada para operator yang ada di desa yang sifatnya juga berjenjang dan rutin, dan kami juga terus mengawasi mengenai pelaksanaan dari program ini. Kemudian untuk menjaga agar nilai dari program ini terus berlanjut terdapat sebuah forum yang dinamakan FKDD (Forum Komunikasi Desa Digital) jadi forum ini bersifat komunitas yang isinya adalah orang-orang yang peduli akan adanya digitalisasi di desa, jadi adanya forum ini menjadi sebuah wadah untuk para operator untuk saling diskusi berkaitan dengan digitalisasi yang ada di desa dan dari kami pun juga menjadi anggota forum tersebut dan juga ikut sharing karena ya forum ini penting buat keberlanjutan digitalisasi desa karena keberadaannya di luar dari program smart village tapi di dalamnya membahas mengenai digitalisasi pemerintahan desa yang sesuai dengan nilai utama yang terkandung dalam program”.

“Untuk menjaga agar program *smart village* tetap berjalan dengan baik maka kami juga kerap kali melakukan kunjungan ke desa-desa yang menjadi lokus program *smart village*, tujuannya selain kami mengawasi secara langsung juga memberi bimbingan teknis terhadap operator desa, selain itu kami juga secara rutin melakukan bimbingan teknis melalui pelatihan baik secara langsung maupun melalui *online*”.

- Buich Wisnu Prabowo (Kepala Desa Sribhawono)

“Saya setuju kalau yang operator yang membidangi memang harus kompeten dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, jadi saya menunjuk mas Anvel sebagai operator desa karena ya memang dia S2 komunikasi jadi ya

menurut saya layak untuk menjadi operator desa, dan selama ini memang beliau layak serta kompeten”.

- Anvel (Operator Desa Sribhawono)

“Saya ditunjuk oleh Pak Kades untuk menjadi operator desa dan membidangi juga program smart village, oleh karena itu saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap program dan masyarakat jadi saya ikut beberapa kali bimbingan teknis dari dinas untuk memahami terkait pelaksanaan program”.

“Saya juga telah ikut serta dalam Forum Komunikasi Desa Digital (FKDD) di situ saya sering bertanya terkait dengan teknis program dan kami jalin komunikasi dengan baik, dan adanya forum ini dapat membantu saya sebagai operator untuk meningkatkan keterampilan saya. Selain itu saya juga *join* dalam beberapa grup Facebook operator desa di Lampung disitu juga berisi *sharing* terkait kendala dan sebagainya”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen-dokumen, laporan, catatan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu dokumentasi juga dapat dilakukan melalui berbagai gambar-gambar atau visualisasi lainnya yang dapat diamati.

Pada penelitian ini dokumentasi telah dilakukan dengan mengumpulkan data dengan merekam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program *smart village*.

Dokumentasi berupa foto-foto dari implementasi program *smart village* dan kegiatan penelitian, serta *screen captured* yang berasal dari *website* Sribhawono.id dan *website* Kementrian Desa telah terlampir pada bagian Lampiran yang terdapat pada akhir penelitian ini. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang berbentuk visual dengan tujuan untuk validasi data penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data. Berikut ini adalah teknik mengolah data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Editing* Data

Teknik *editing* data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memeriksa kembali dan memperbaiki data yang sudah didapat. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah data yang didapat dengan relevansinya terhadap penelitian, selain itu dalam teknik ini juga terdapat proses memperbaiki atau menghapus kesalahan pada data yang telah didapat dari teknik mengumpulkan data yang telah dilakukan. Fungsi dari *editing* data adalah untuk menghasilkan data yang jelas, rasional, serta layak untuk disajikan. Dalam penelitian ini, data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan pelaksanaan program *smart village* akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian peneliti akan melakukan proses *editing* data agar dapat menghasilkan *output* data yang dapat menunjang kualitas penelitian.

Peneliti telah melakukan *editing data* dengan menyusun penelitian ini yang disesuaikan dengan Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung yang dijadikan sebagai panduan teknis dalam penulisan. Selain itu *editing data* juga dilakukan dengan memperbaiki hasil koreksi dari draf yang telah dikumpulkan kepada dosen pembimbing. Saran dan arahan dosen pembimbing merupakan dasar dari *editing data* oleh Peneliti.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan sebuah proses untuk mengkaji, dan memahami data yang telah diperoleh kemudian membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan diedit

nantinya akan digabungkan kemudian peneliti akan mempelajari dan menganalisa untuk memperoleh kesimpulan.

Peneliti telah melakukan interpretasi data dengan mempelajari data yang diperoleh di lokasi penelitian, dari berbagai hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti melakukan analisa terhadap setiap data yang diperoleh dari kegiatan penelitian, setelah mengkaji dan memahami data peneliti mengumpulkan data yang telah diinterpretasikan lalu dituangkan dalam bab hasil dan pembahasan.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari, memahami, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang diterapkan yang dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) akan digunakan, analisis data ini meliputi tiga alur yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Maksud dari tahap reduksi data adalah meringkas, menggolongkan, menghapus data yang tidak perlu, memilah dan memilih data yang mendukung penelitian, serta mengatur kembali data pokok yang bertujuan untuk memperjelas pola penelitian sehingga kesimpulan dapat diverifikasi. Menurut Hardani (2020) reduksi data juga dapat mempermudah dan mentransformasikan data kualitatif melalui proses yang lebih ketat, ringkas, dan penggolongan data dalam pola yang lebih luas, dan lain-lain.

Peneliti telah memisahkan data yang penting dan mana data yang kurang mendukung penelitian, data yang mendukung penelitian terkait dengan evaluasi program *smart village* dimasukkan dalam penelitian ini dengan mencantumkan pada hasil dan pembahasan, sedangkan data yang

tidak sesuai atau tidak mendukung tidak peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar data yang tersaji dalam penelitian ini akurat dan tidak bertele-tele.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dapat memungkinkan peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dengan menampilkan teks naratif yang berbentuk uraian singkat, bagan, atau sebagainya. Dengan penyajian yang bersifat naratif nantinya akan mempermudah peneliti untuk memahami peristiwa atau masalah yang terjadi dalam penelitian yang kemudian dapat merencanakan langkah selanjutnya (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini disajikan data yang bersifat naratif mengenai pelaksanaan program *smart village* yang nantinya akan menjadi bahan untuk evaluasi dari pelaksanaan program tersebut.

Data yang telah diperoleh terkait evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono telah diinterpretasikan dan diedit selanjutnya peneliti menyajikan data yang telah diseleksi melalui penyampaian data berupa narasi-narasi yang telah dicantumkan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan data yang valid. Kesimpulan dapat diverifikasi secara terus menerus selama jalannya penelitian dengan memperhatikan data yang diuji kebenarannya, apabila data yang didapat sudah konsisten dan valid maka dapat dikatakan kesimpulan tersebut kredibel. Pada tahapan ini penarikan kesimpulan didapat dari data yang dihasilkan di lapangan mengenai pelaksanaan program *smart village*, kemudian apabila data yang didapat sudah konsisten dan valid maka kesimpulan dalam bentuk evaluasi kredibilitasnya tidak perlu diragukan.

Penarikan kesimpulan telah dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan berbagai proses analisa dan *editing data*, dari hasil proses tersebut telah diperoleh data terkait evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono dengan kesimpulan sementara evaluasi pelaksanaan program *smart village* di Desa Sribhawono telah berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan yang perlu ditingkatkan agar program berjalan lebih relevan, efektif, berdampak, dan berkelanjutan.

3.9 Teknik Validasi Data

Pada Penelitian kualitatif untuk memperoleh validitas data diperlukan teknik sebagai syarat sebuah informasi dapat disajikan dalam sebuah penelitian (Nugrahani, 2014). Teknik untuk mendapat keabsahan data tersebut dinamakan triangulasi Menurut Sugiyono (2020) terdapat tiga triangulasi dalam teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Adapun dalam penelitian ini triangulasi sumber akan digunakan sebagai teknik validasi data, hal ini dilakukan dengan:

1. Mengkaji data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan pelaksanaan program *smart village* di Desa Sribhawono, dalam hal ini pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini data telah diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai data pokok yang diperoleh dari penelitian, hasil wawancara dengan berbagai pihak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan pendekatan multi persepsi, narasumber yang berasal dari pihak pengelola yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung peneliti gunakan sebagai perspektif dari pihak pengelola tentang bagaimana seharusnya program dilaksanakan, kemudian narasumber yang berasal dari pihak Pemerintah Desa Sribhawono peneliti gunakan sebagai perspektif pihak pelaksana, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan. Setelah data wawancara diperoleh peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian

dengan mengamati bagaimana proses pelaksanaan program *smart village* dengan dukungan dokumentasi sebagai validasi.

2. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program *smart village*, jika hasil wawancara, observasi dan dokumentasi relevan antar satu dengan yang lain maka data yang didapat sudah tervalidasi dan peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara yang telah diperoleh dari pihak Pemerintah Desa Sribhawono telah dibandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan melalui observasi secara langsung dan data yang diperoleh dari pihak pengelola. Fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini juga merupakan dasar pembanding antara fakta yang terjadi dengan bagaimana idealnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan berbagai temuan pada penelitian yang telah dicantumkan dalam bab hasil dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil evaluasi program *smart village* di Desa Sribhawono secara umum dalam pelaksanaannya sudah dapat dikategorikan baik sekalipun terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan program yang kurang maksimal seperti tersedianya layanan perpustakaan desa tidak diikuti dengan partisipasi masyarakat atau minat baca masyarakat masih rendah dan adanya layanan internet gratis menimbulkan dampak negatif yaitu terdapat oknum masyarakat yang menyalahgunakannya untuk bermain judi *online*. Hasil penelitian dapat dikategorikan baik karena telah memenuhi berbagai indikator yang terdapat pada cakupan *relevance*, *effectiveness*, *impact*, dan *sustainability*. Hal ini didukung dengan berbagai temuan fakta yang terdapat pada bab hasil dan pembahasan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian Evaluasi Program *Smart Village* Desa Sribhawono adalah sebagai berikut:

1. *Relevance*

Diharapkan bagi Pemerintah Desa Sribhawono untuk melakukan berbagai langkah inovatif dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat agar layanan perpustakaan dapat aktif kembali.

Untuk menjaga agar program dilaksanakan sesuai dengan visi-misi diharapkan pihak pengelola yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung untuk selalu melakukan *control* terhadap desa-desa yang menjadi lokus program *smart village*.

2. *Effectiveness*

Dalam upaya menjaga manfaat program *smart village* bagi masyarakat, diharapkan Pemerintah Desa Sribhawono dapat menjaga kemudahan akses *website* desa dengan melakukan *maintenance* agar tidak terjadi lagi *website error* di kemudian hari.

3. *Impact*

Untuk meminimalisir dampak negatif dari program *smart village*, diharapkan Pemerintah Desa Sribhawono tetap melakukan pengawasan terhadap pengguna layanan internet gratis dengan cara cek langsung di balai desa dan menonaktifkan layanan internet di tengah malam.

4. *Sustainbiity*

Untuk meningkatkan keterampilan para operator desa diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung untuk rutin melaksanakan bimbingan teknis agar para operator desa dapat *upgrade skill* untuk pelaksanaan program *smart village smart village* yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AW, Suranto. 2018. Evaluasi Program Desa Mandiri Informasi Berbasis Aplikasi Android Sistem Informasi Desa (SIFORDES). *INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi*, 48 (1) : 1-13.
- Damarjati, D. 2021. Smart Village Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan. Jakarta : Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan> diakses pada tanggal 25 September 2023.
- Dehani, M., Hernawan, D., dan Purnamasari, I. 2018. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Govenansi*, 4 (1) : 45-56.
- Dilahur. 1994. *Geografi Desa Dan Pengertian Desa*. Forum Geografi, 14 dan 15 Th. VII : 124-127.
- Dwi, A. 2023. Metode Evaluasi Kebijakan Publik. Opini. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=evaluasi+kebijakan+publik&ots=x-UZmIAiNX&sig=yQIJt3KQaes98z_bNRZjBs8cL44&redir_esc=y#v=onepage&q=evaluasi%20kebijakan%20publik&f=false diakses pada tanggal 27 September 2023.
- Fitriana, M, Hermawan, D, Caturiani, S I. 2021. Evaluasi Formulasi Kebijakan Smart Village Provinsi Lampung. *Jurnal Wacana Publik*. 15(2) : 65-74.

- Herdiana, D. 2019. Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia. *JURNAL IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*. 21(1) : 1-16.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
- Kadir, A. (2018). *Pemrograman Android & Database*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kusnaedi. 2006. *Membangun Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Maharani, N, Kencono, S. 2021. Penerapan *Smart Governance* Dalam *Smart Village* Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*. 5(2) : 25-38.
- Mayowan, Y. 2019. Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 14-23.
- Munir, D. 2017. *Smart village: Desa Maju, Desa Bahagia*. APEKSI: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
- Nursetiawan, I. 2020. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis *Smart Village*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 7 (1) : 112-119.
- Paulinus, V, Djunaedi, A, Herwangi, Y. 2019. Tahap Pengembangan *Smart Kampung* di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth*. 4(2) : 2-3.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana Program *Smart Village*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Potabuga, V. 2022. Struktur Pemerintahan Desa Terbaru Lengkap dengan Tugas dan Fungsinya. <https://bungko.desa.id/2022/11/struktur-pemerintah-des/>

[terbaru-lengkap-dengan-tugas-dan-fungsinya/](#) diakses pada tanggal 25 September 2023.

Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press. Surakarta.

Saidah, N., Khasanah, L., Asriyatuzahra., dan Ridloah, S. 2022. Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Kradegan dala Mendukung Program *Smart Village*. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(2) : 123-135.

Saputro, A., Khasanah, I. 2016. Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Floo Café Ungaran). *Diponegoro Journal of Management*, 5(4) : 3.

Sardjo, S, Darmajanti, L., dan Boediono, Koeshariyaningsih C. 2016. *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1-25.

SK Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Warsita, B, 2008. *Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta

Way, H., Wuisang, C. E. V., dan Sondakh, J. A. R. 2022. Evaluasi Penerapan Konsep Kelurahan Cerdas (*Smart Village*) di Kota Manado. *Media Matrasain*, 19 (2) : 57-68.

Widjaja, H.A.W. 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Widjaja, H.A.W. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Wirawan, V. 2020. Penerapan *E-Government* Dalam Menyongsong Era Evolusi Industri 4.0 Kontemorer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (1) : 1-16.